

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **1.1. Kesimpulan**

Mengacu pada hasil analisis deskriptif dan analisis inferensial menggunakan metode SEM berbasis Partial Least Square, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa Penyerapan Dana Kapitasi berada pada kategori sangat baik. Hal ini ditunjukkan oleh adanya perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan serta kompetensi sumber daya manusia semuanya sangat baik.
2. Hasil uji statistic menunjukkan bahwa perencanaan dan penganggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan dana kapitasi pada level signifikansi  $> 0.05$  yaitu 0.877.
3. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa pelaksanaan dan penatausahaan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan dana kapitasi JKN pada level signifikansi  $< 0.05$ , yaitu 0.017.
4. Hasil uji statistic menunjukkan bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban berpengaruh signifikan terhadap penyerapan dana Kapitasi JKN pada level signifikansi  $< 0.05$ , yaitu 0.038.
5. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa pembinaan dan pengawasan tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan dana Kapitasi JKN pada level signifikansi  $>0.05$ , yaitu 0.994.
6. Hasil uji statistic menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap penyerapan dana kapitasi JKN pada level signifikansi  $<0.05$ , yaitu 0.042.

7. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa kontribusi variabel Perencanaan dan penganggaran, Pelaksanaan dan penatausahaan, Pelaporan dan pertanggungjawaban, Pembinaan dan pengawasan dan variabel Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap penyerapan dana kapitasi sebesar 73,1 %, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini. Hal ini bermakna bahwa semakin baik perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan serta kompetensi sumber daya manusia maka semakin baik penyerapan dana kapitasi JKN.

## **1.2. Saran**

Sesuai hasil analisis deskriptif dan uji hipotesis serta kesimpulan diatas maka disarankan sebagai berikut:

1. Dalam upaya peningkatan penyerapan dana kapitasi JKN, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu dan Puskesmas, diharapkan dapat memberikan perhatian terhadap:
  - a. proses pelaksanaan dan penatausahaan, dalam hal ini proses pembuatan dokumen pelaksanaan anggaran, proses pengadaan barang dan jasa serta pembukuan. Jadwal pelaksanaan harus ditinjau kembali sehingga proses boleh berjalan sesuai waktu.
  - b. proses pelaporan dan pertanggungjawaban, dalam hal ini pembuatan laporan-laporan keuangan (laporan realisasi anggaran(LRA), Surat permintaan pengesahan belanja(SP3B), Surat pengesahan belanja(SP3B), harus segera dibuat setelah dana dicairkan dan digunakan.
2. Mendorong Peningkatan kualitas Kompetensi Sumber daya manusia dalam hal ini pengelola keuangan kapitasi perlu dilakukan pelatihan atau bimbingan teknis secara intensif.

3. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya, agar menambahkan variabel baru dan sampel yang dapat berpengaruh terhadap penyerapan dana Kapitasi JKN.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Abe,Alexander.2001.*Perencanaan Daerah :memperkuat Prakarsa Rakyat dalam otonomi daerah*.laporan Pustaka Utama;Yogyakarta.

Abdullah,M.2014.*Manajemen dan evaluasi Kinerja Karyawan*.Yogyakarta: Penerbit Aswaja Presindo.

Abdillah,W.,Hartono,J.2015.*Partial Least Square (PLS)*. Yogyakarta:Andi.

Bastian, I. 2006. *Akutansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Erly Suandy,*Perencanaan Pajak,Edisi I*.2001,Jakarta,Salemba Empat.

Halim, Abdul. 2007. *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Pertama*. UPP AMP YKPN.Yogyakarta.

2014.: *Manajemen Keuangan Sektor Publik. Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah)*; Penerbit Salemba Edisi Ke Empat.

Hasibuan M.2003,*Organisasi dan Motivasi dasar peningkatan produktivitas*.Jakarta;Bumi Aksara.

2009,*manajemen dasar,Pengertian dan Masalah.edisi Revisi*,Jakarta;Bumi Aksara.

2011 *Manajemen Sumber daya manusia*,Jakarta;Bumi Aksara .

Hariandja,Marihat Tua Effendi,2002,*Manajemen Sumber daya manusia*,Grasindo,Jakarta.

Hevesi G.Alan,2005 *Standart For internal control in new York state Government*.www.osc.state.NY.US

Ivanvevich, John M,dkk 2008 *Perilaku dan Manajemen Organisasi Jilid 1 dan 2* Jakarta; Erlangga.

Kuncoro,Mudrajat.2010.*Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi untuk Bisnis & Ekonomi*,Yogyakarta,Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Mahmudi. 2009. Penerbit Erlangga: *Manajemen Keuangan Daerah*.

Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Mardiasmo.2002.*Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi.Yogyakarta.

2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*.Yogyakarta : Andi

2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.
- Masdar Helmi, 1973. *Dakwah dalam alam pembangunan I* , Semarang; Toha Putra
- Masmanian, Daniel A. and Paul A. Sabatier, 1983, *Implementation and Publik Policy*, New York : Harper Collins.
- Mathis L. Robert dan Jakson H. John. 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Buku kedua Salemba empat.
- Soemarsono, Sonny. 2003. *Ekonomi Manajemen sumber daya manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soedarmayanti. 2009. *Sumber daya manusia dan produktivitas kerja*. Bandung; Penerbit Mandar Maju.
- Sutrisno Edy. 2010. *Manajemen sumber daya manusia*, Jakarta Kencana, Prenada Media Group.
- Sarwoto. 1981. *Dasar-dasar organisasi dan manajemen*. Jakarta Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: ALFABETA)
- Santosa. 2018. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta. Penerbit Andi
- Lewis. 2013. *Metodologi Penelitian Perilaku Petani*. Kupang. Penerbit Ledalero

### **Artikel Jurnal**

- Abdul Gani Hasan, dkk. 2017. *Analisis Kebijakan Pemanfaatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan nasional Pada FKTP/Puskesmas di kabupaten Bogor tahun 2016*.
- Angraeni R.T. dkk. 2016. *Analisis Pemanfaatan dana kapitasi oleh Puskesmas dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional di kabupaten Purbalingga*
- Faozi Kurniawan, M., Eko Siswoyo, B., Novelira, A., Sulistiawan, D., Aisyah, W., Gadistina, W., Kurniawati, G. (2017). Pengelolaan Sisa Lebih Dana Kapitasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah (Monitoring dan Evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia). *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 6(1), 1–12. <https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/29001/17412>
- Harbing H. 2018. *Analisis Pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama Milik Pemerintah*.
- Harbing, H. H. (2018). Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah. *Jurnal Katalogis*, 6(3),

117–127. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/13850>

Hasan, A. G., & Adisasmito, W. B. B. (2017). Analisis Kebijakan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas di Kabupaten Bogor Tahun 2016. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 6(3), 127. <https://doi.org/10.22146/jkki.v6i3.29658>

Modokompit R,dkk.2017.*Implementasi pemanfaatan dan pengelolaan keuangan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama Pemerintah Kota Kotamobagu.*

Noah De Lissovoy & Peter McLaren,2003,*Journal of Education Policy Volume 18,Issue 2,Educational 'accountability' and the violence of capital : a Marxian reading.*

Palino, D. (2017). *Analisis Pemanfaatan Dana Kapitasi Dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pada Puskesmas Makale.*

Yulianto, M., & Nadjib, M. (2017). Pemanfaatan Dana Kapitasi oleh Puskesmas di Kota Lubuklinggau Tahun 2014-2016. *Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia*, 2(1), 32–38. <https://doi.org/10.7454/jurnal-eki.v2i1.1963>

#### **Tesis:**

Heriawan,2015.*Evaluasi pemanfaatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu.*

Rahmi Eliza,2014. *Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional dalam pemanfaatan dana kapitasi pada puskesmas yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan layanan umum daerah di Provinsi DKI Jakarta.*

#### **Regulasi**

Pemerintah Indonesia,2003.*Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.*

Pemerintah Indonesia,2004.*Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional.*

Pemerintah Indonesia,2004.*Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.*

Pemerintah Indonesia,2004. *Undang – Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.*

Pemerintah Indonesia,2009. *Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.*

Pemerintah Indonesia,2011. *Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*

*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.*

*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2021 Tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP milik Pemerintah.*

*Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Tingkat Pertama(FKTP) Milik Pemerintah Daerah.*

*Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 206 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran.*

*Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk jasa pelayanan Kesehatan dan dukungan biaya operasional pada FKTP milik Pemerintah.*

*Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2016 Tentang Penggunaan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk jasa pelayanan Kesehatan dan dukungan biaya operasional pada FKTP milik Pemerintah*

*Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900/2280/SJ Tahun 2014, Tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.*